

## **II. TINJAUAN PUSTAKA**

### **A. Tinjauan Gaya Kepemimpinan**

#### **1. Pengertian Gaya Kepemimpinan**

Menurut Tampubolon (2008; 15), gaya kepemimpinan adalah ciri seorang pemimpin melakukan kegiatannya dalam mengarahkan, mempengaruhi, menggerakkan perilaku para pengikutnya atau bawahannya kepada suatu tujuan tertentu. Perbedaan gaya kepemimpinan dalam organisasi akan mempunyai pengaruh yang berbeda pula pada partisipasi individu dan perilaku kelompok.

Menurut Hasibuan (2004: 76), gaya kepemimpinan pada dasarnya mengandung pengertian sebagai suatu perwujudan tingkah laku dari seorang pemimpin, yang menyangkut kemampuannya dalam memimpin. Perwujudan tersebut biasanya membentuk suatu pola atau bentuk tertentu. Dengan kata lain pola tindakan pemimpin secara keseluruhan seperti yang dipersepsikan atau diacu oleh bawahan tersebut dikenal sebagai gaya kepemimpinan.

Menurut Hersey dan Blanchard (1992) dalam Handoko (2005: 45), berpendapat bahwa gaya kepemimpinan pada dasarnya merupakan

perwujudan dari tiga komponen, yaitu pemimpin itu sendiri, bawahan, serta situasi di mana proses kepemimpinan tersebut diwujudkan.

Pengertian tersebut mengandung makna bahwa pimpinan adalah seseorang yang dapat mempengaruhi orang lain atau kelompok untuk melakukan unjuk kerja maksimum yang telah ditetapkan sesuai dengan tujuan organisasi. Organisasi akan berjalan dengan baik jika pimpinan mempunyai kecakapan dalam bidangnya, dan setiap pimpinan mempunyai keterampilan yang berbeda, seperti keterampilan teknis, manusiawi dan konseptual. Sedangkan bawahan adalah seorang atau sekelompok orang yang merupakan anggota dari suatu perkumpulan atau pengikut yang setiap saat siap melaksanakan perintah atau tugas yang telah disepakati bersama guna mencapai tujuan. Dalam suatu organisasi, bawahan mempunyai peranan yang sangat strategis, karena sukses tidaknya seseorang pimpinan bergantung kepada para pengikutnya ini. Oleh sebab itu, seorang pemimpin dituntut untuk memilih bawahan dengan secermat mungkin.

Situasi merupakan suatu keadaan yang kondusif, di mana seorang pimpinan berusaha pada saat-saat tertentu mempengaruhi perilaku orang lain agar dapat mengikuti kehendaknya dalam rangka mencapai tujuan bersama. Dalam satu situasi misalnya, tindakan pimpinan pada beberapa tahun yang lalu tentunya tidak sama dengan yang dilakukan pada saat sekarang, karena memang situasinya telah berlainan. Dengan demikian, ketiga unsur yang mempengaruhi gaya kepemimpinan tersebut, yaitu

pimpinan, bawahan dan situasi merupakan unsur yang saling terkait satu dengan lainnya, dan akan menentukan tingkat keberhasilan kepemimpinan.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas maka konsep gaya kepemimpinan Kepala Pekon Kubuliku Jaya adalah suatu cara yang dikembangkan oleh seorang pemimpin desa Kubuliku Jaya dalam rangka menggerakkan para bawahan atau orang-orang yang dipimpinnya untuk melaksanakan pekerjaan dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh organisasi.

## **2. Macam-Macam Gaya Kepemimpinan**

Menurut Siagian (1997: 43-47), macam-macam gaya kepemimpinan adalah sebagai berikut:

### **a. Gaya Kepemimpinan Otoriter**

Seorang pemimpin yang otoriter ialah pemimpin yang memiliki kriteria atau ciri sebagai berikut: Menganggap organisasi sebagai pemilik pribadi; Mengidentikkan tujuan pribadi dengan tujuan organisasi; Menganggap bawahan sebagai alat semata-mata; Tidak mau menerima kritik, saran dan pendapat; Terlalu tergantung kepada kekuasaan formalnya; Dalam tindakan penggerakannya sering mempergunakan pendekatan yang mengandung unsur paksaan dan bersifat menghukum.

b. Gaya Kepemimpinan Militeristis

Perlu diperhatikan terlebih dahulu bahwa yang dimaksud dari seorang pemimpin tipe militerisme berbeda dengan seorang pemimpin organisasi militer. Seorang pemimpin yang bertipe militeristis ialah seorang pemimpin yang memiliki sifat-sifat berikut: Dalam menggerakkan bawahan sistem perintah yang lebih sering dipergunakan; Dalam menggerakkan bawahan senang bergantung kepada pangkat dan jabatannya; Senang pada formalitas yang berlebihan; Menuntut disiplin yang tinggi dan kaku dari bawahan; Sukar menerima kritikan dari bawahannya; Menggemari upacara-upacara untuk berbagai keadaan.

c. Gaya Kepemimpinan Paternalistis

Seorang pemimpin yang tergolong sebagai pemimpin yang paternalistis ialah seorang yang memiliki ciri sebagai berikut: menganggap bawahannya sebagai manusia yang tidak dewasa; bersikap terlalu melindungi (*overly protective*); jarang memberikan kesempatan kepada bawahannya untuk mengambil keputusan; jarang memberikan kesempatan kepada bawahannya untuk mengambil inisiatif; jarang memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan daya kreasi dan fantasinya; dan sering bersikap maha tahu.

d. Gaya Kepemimpinan Karismatik

Hingga sekarang ini para ahli belum berhasil menemukan sebab-sebab mengapa seseorang pemimpin memiliki karisma. Umumnya diketahui bahwa pemimpin yang demikian mempunyai daya tarik yang amat besar dan karenanya pada umumnya mempunyai pengikut yang jumlahnya yang sangat besar, meskipun para pengikut itu sering pula tidak dapat menjelaskan mengapa mereka menjadi pengikut pemimpin itu. Karena kurangnya pengetahuan tentang sebab musabab seseorang menjadi pemimpin yang karismatik, maka sering hanya dikatakan bahwa pemimpin yang demikian diberkahi dengan kekuatan gaib (*supra natural powers*). Kekayaan, umur, kesehatan, profil tidak dapat dipergunakan sebagai kriteria untuk karisma.

e. Gaya Kepemimpinan Demokratis

Pengetahuan tentang kepemimpinan telah membuktikan bahwa tipe pemimpin yang demokratislah yang paling tepat untuk organisasi modern. Hal ini terjadi karena gaya kepemimpinan ini memiliki karakteristik sebagai berikut: dalam proses penggerakan bawahan selalu bertitik tolak dari pendapat bahwa manusia itu adalah makhluk yang termulia di dunia; selalu berusaha mensinkronisasikan kepentingan dan tujuan organisasi dengan kepentingan dan tujuan pribadi dari pada bawahannya; senang menerima saran, pendapat, dan bahkan kritik dari bawahannya; selalu berusaha mengutamakan kerjasama dan *teamwork* dalam usaha mencapai tujuan; ikhlas memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada bawahannya untuk

berbuat kesalahan yang kemudian diperbaiki agar bawahan itu tidak lagi berbuat kesalahan yang sama, tetapi lebih berani untuk berbuat kesalahan yang lain; selalu berusaha untuk menjadikan bawahannya lebih sukses daripadanya; dan berusaha mengembangkan kapasitas diri pribadinya sebagai pemimpin. Secara implisit tergambar bahwa untuk menjadi pemimpin tipe demokratis bukanlah hal yang mudah. Namun, karena pemimpin yang demikian adalah yang paling ideal, alangkah baiknya jika semua pemimpin berusaha menjadi seorang pemimpin yang demokratis.

Pendapat lain dikemukakan oleh Nawawi (1999: 67-68), bahwa macam-macam gaya kepemimpinan adalah sebagai berikut:

a. Kepemimpinan direktif

Dalam gaya kepemimpinan ini, bawahan tidak diberi kesempatan untuk ikut berpartisipasi.

b. Kepemimpinan yang mendukung

Dalam gaya kepemimpinan ini, pemimpin mempunyai kesediaan untuk menjelaskan sendiri, bersahabat, dan mudah didekati serta mempunyai perhatian kemanusiaan yang murni terhadap bawahannya.

c. Kepemimpinan partisipasif

Dalam gaya kepemimpinan ini, pemimpin berusaha meminta dan menggunakan saran-saran dari bawahan, tapi pengambilan keputusan masih berada padanya.

d. Kepemimpinan yang berorientasi pada prestasi

Dalam gaya kepemimpinan ini, ditetapkan serangkaian tujuan yang menantang para bawahan untuk berprestasi. Pemimpin memberikan keyakinan kepada mereka bahwa mereka mampu melaksanakan pekerjaannya dengan baik.

Setiap gaya kepemimpinan tersebut memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Menurut Nawawi (1999: 69-71), kelebihan dan kekurangan gaya kepemimpinan adalah sebagai berikut:

a. Kepemimpinan direktif

Kelebihan gaya kepemimpinan direktif terdapat pada pencapaian prestasi kerjanya. Pemimpin yang menerapkan gaya kepemimpinan ini relatif lebih cepat mencapai tujuan atau hasil pekerjaan, sebab tidak ada interupsi, masukan, saran atau bantahan bawahan. Artinya ketika pemimpin memutuskan suatu tujuan, maka hal itu adalah harga mati, tidak ada alasan, yang ada adalah hasil.

Kelamahan gaya kepemimpinan ini adalah tidak ada komunikasi dan interaksi dialogis dengan bawahan, hubungan yang tercipta terkesan dingin dan kaku. Pemimpin dengan gaya ini cenderung mementingkan pencapaian tujuan dan kurang atau tidak memperdulikan proses untuk mencapai tujuan tersebut.

b. Kepemimpinan yang mendukung

Kelebihan gaya kepemimpinan yang mendukung adalah mampu menarik orang lain atau bawahannya untuk melakukan pekerjaan

secara efektif dan penuh tanggungjawab sebab pemimpin senantiasa memberikan dukungan di belakang mereka.

Kelemahan gaya kepemimpinan yang mendukung adalah kurangnya ruang bagi bawahan untuk mengembangkan diri dan kemampuan kerja mereka, sebab dengan terus menerus dukungan atau dorongan dari pemimpin maka bawahan merasa dibatasi untuk mengembangkan potensi yang ada di dalam diri mereka.

c. Kepemimpinan partisipasif

Kelebihan gaya kepemimpinan partisipasif adalah terciptanya hubungan yang harmonis antara pimpinan dengan bawahan, sebab pimpinan selalu memberikan kesempatan kepada bawahan untuk menyampaikan masukan, gagasan atau saran kepada pimpinan dalam melaksanakan suatu pekerjaan.

Kelemahan gaya kepemimpinan partisipasif adalah pelaksanaan pekerjaan organisasi yang terkadang kurang sesuai dengan perencanaan, karena banyaknya pertimbangan pemimpin dalam mengambil langkah-langkah atau tindakan. Pemimpin membutuhkan waktu untuk mempertimbangkan berbagai masukan dan saran dari bawahan, sehingga berdampak pada kurang sesuainya waktu pelaksanaan pekerjaan dengan rencana sebelumnya.



d. Kepemimpinan yang berorientasi pada prestasi

Kelebihan gaya kepemimpinan yang berorientasi pada prestasi adalah pemimpin senantiasa mewujudkan kebersamaan dengan para bawahannya dalam suatu ikatan kekeluargaan untuk mencapai prestasi atau hasil pekerjaan secara bersama-sama. Prestasi perseorangan dalam organisasi merupakan prestasi organisasi itu sendiri.

Kekurangan gaya kepemimpinan ini adalah kurang terakomodasinya keinginan dan kepentingan tiap-tiap personil dalam organisasi, karena prestasi perseorangan menjadi prestasi organisasi. Artinya seorang pegawai yang memiliki kinerja yang baik kurang dapat mengembangkan dirinya, karena meskipun pegawai tersebut memiliki prestasi kerja yang melebihi rekan-rekannya, namun kurang mendapatkan perhatian yang lebih karena dianggap prestasi bersama.

Seorang pemimpin harus memiliki gaya kepemimpinan yang baik, sehingga diharapkan seorang pemimpin tersebut akan dapat melaksanakan fungsi kepemimpinannya dalam organisasi yang dipimpinnya. Sifat-sifat pemimpin tidak seluruhnya dilahirkan, tetapi dapat juga dicapai lewat suatu pendidikan dan pengalaman. Dengan adanya gaya kepemimpinan sebagaimana disebutkan di atas maka diharapkan pemimpin akan dapat menjadi teladan dan contoh yang baik kepada para bawahan dalam bekerja sehingga produktivitas kerja mereka akan meningkat dan pada tahap selanjutnya akan dapat mencapai tujuan organisasi.

Selain itu menurut Setyawan (2007: 19), beberapa gaya kepemimpinan lainnya adalah sebagai berikut:

a. Gaya kepemimpinan Kooperatif

Gaya kepemimpinan kooperatif adalah kepemimpinan yang mengembangkan adanya kerjasama antara subsistem atau komponen yang ada di dalam organisasi. Ciri-ciri gaya kepemimpinan kooperatif adalah:

- (1) Mengembangkan dan menyalurkan kebebasan berfikir dan mengeluarkan pendapat, baik secara perseorangan maupun kelompok sebagai usaha mengumpulkan data/bahan dari anggota kelompok dalam menetapkan keputusan yang mampu memenuhi aspirasi dalam kelompoknya.
- (2) Mengusahakan dan mendorong terjadinya pertemuan pendapat/buah pikiran dengan sikap harga menghargai
- (3) Mengembangkan suasana kerja sama yang efektif dengan memberikan penghargaan dan pengakuan terhadap kemampuan orang-orang yang dipimpin sehingga timbul kepercayaan pada dirinya sendiri dan kesediaan menghargai orang lain sesuai dengan kemampuannya.
- (4) Membantu menyelesaikan masalah-masalah baik yang dihadapi perseorangan maupun kelompok dengan memberikan petunjuk dalam mengatasinya sehingga berkembang kesediaan memecahkannya dengan kemampuan sendiri.

b. Gaya kepemimpinan Komunikatif

Gaya kepemimpinan komunikatif adalah kepemimpinan yang mengembangkan adanya komunikasi atau interaksi yang harmonis antara berbagai subsistem atau komponen yang ada di dalam organisasi. Ciri-ciri gaya kepemimpinan komunikatif adalah:

- (1) Semua kebijaksanaan dikomunikasikan sehingga terjadi pada kelompok diskusi dan keputusan diambil dengan dorongan dan bantuan dari pemimpin
- (2) Kegiatan-kegiatan dikomunikasikan dan didiskusikan, langkah-langkah umum untuk tujuan kelompok dibuat, dan jika dibutuhkan petunjuk-petunjuk teknis pemimpin menyarankan dua atau lebih alternatif prosedur yang dapat dipilih.
- (3) Para anggota bebas bekerja dengan siapa saja yang mereka pilih dan pembagian tugas ditentukan oleh kelompok.

c. Gaya kepemimpinan *Low Profile*

Gaya kepemimpinan low profile adalah kepemimpinan yang mengembangkan sifat yang menyejajarkan antara kedudukan pimpinan dan bawahan. Pimpinan tidak menganggap dirinya sebagai atasan yang harus ditakuti dan disegani oleh bawahan, tetapi sebagai mitra kerja yang sejajar. Ciri-ciri gaya kepemimpinan *low profile* adalah:

- (1) Pemimpin tidak memosisikan diri sebagai atasan yang harus disegani atau ditakuti
- (2) Pemimpin membiarkan bawahannya untuk mengatur dan manajemen tugas dan pekerjaannya

- (3) Pemimpin menentukan kebijaksanaan dan tujuan umum dalam organisasi
- (4) Bawahan dapat mengambil keputusan yang relevan untuk mencapai tujuan dalam segala hal yang mereka anggap cocok.

Keunggulan dan kekurangan gaya kepemimpinan menurut Setyawan (2007: 19), adalah sebagai berikut:

a. Gaya kepemimpinan Kooperatif

Keunggulan gaya kepemimpinan kooperatif adalah pekerjaan merupakan tanggungjawab bersama dan adanya kerjasama yang baik antara subsistem yang ada di dalam organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan. Kelemahan gaya kepemimpinan kooperatif adalah tidak semua pegawai mampu menjalin kerjasama, baik dengan sesama rekan kerja maupun dengan atasannya. Dalam kaitannya dengan ini terkadang terjadi kesenjangan antara bawahan dengan sesama bawahan maupun antara bawahan dengan atasan.

b. Gaya kepemimpinan Komunikatif

Kelebihan gaya kepemimpinan komunikatif adalah terjalinnya komunikasi yang efektif di dalam organisasi sehingga semua kebijaksanaan dan pekerjaan dapat dikomunikasikan dan diputuskan secara bersama. Kekurangan gaya kepemimpinan ini adalah dalam pelaksanaannya terkadang bawahan merasa memiliki hak dan otoritas dalam menentukan kebijakan di dalam organisasi, sehingga tidak ada batasan yang jelas dalam relasi bawahan dengan atasan.

c. Gaya kepemimpinan *Low Profile*

Kelebihan gaya kepemimpinan *low profile* terbentuknya hubungan kerja yang baik, sehingga antara atasan dan bawahan mampu melaksanakan tugas dan pekerjaannya dengan baik, tanpa hubungan yang kaku. Kekurangan gaya kepemimpinan *low profile* adalah bawahan terkadang salah menafsirkan sifat pimpinan yang menginginkan adanya kemitraan secara sejajar dengan bawahan, sehingga kartawan tersebut terkadang bertindak sesuka hatinya dalam melaksanakan bidang pekerjaannya.

Pendapat lain dikemukakan oleh Handoko (2005: 54) bahwa macam-macam gaya kepemimpinan adalah sebagai berikut:

a. Gaya kepemimpinan demokratis

Kepemimpinan demokratis ditandai dengan adanya suatu struktur yang pengembangannya menggunakan pendekatan pengambilan keputusan yang kooperatif. Dibawah kepemimpinan demokratis bawahan cenderung bermoral tinggi, dapat bekerja sama, mengutamakan mutu kerja dan dapat mengarahkan diri sendiri gaya. Gaya kepemimpinan ini mendeskripsikan pemimpin yang cenderung mengikutsertakan bawahan dalam pengambilan keputusan, mendelegasikan kekuasaan, mendorong partisipasi bawahan dalam menentukan bagaimana metode kerja dan tujuan yang ingin dicapai, dan memandang umpan balik sebagai suatu kesempatan untuk melatih bawahan.

Ciri-ciri gaya kepemimpinan demokratis adalah sebagai berikut:

- 1) Semua kebijaksanaan terjadi pada kelompok diskusi dan keputusan diambil dengan dorongan dan bantuan dari pemimpin
- 2) Kegiatan-kegiatan didiskusikan, langkah-langkah umum untuk tujuan kelompok dibuat, dan jika dibutuhkan petunjuk teknis pemimpin menyarankan dua atau lebih alternatif prosedur yang dapat dipilih.
- 3) Para anggota bebas bekerja dengan siapa saja yang mereka pilih dan pembagian tugas ditentukan oleh kelompok.

Gaya Kepemimpinan Kepala Pekon Kubiliku Jaya Kubuliku Jaya Kecamatan Batu Tulis Kabupaten Lampung Barat dalam Pelaksanaan Pemerintahan Kepala Pekon Kubiliku Jaya termasuk dalam kategori gaya kepemimpinan demokratis, Namun dalam pelaksanaannya tidak semua gaya kepemimpinan Kepala Pekon Kubuliku Jaya demokratis dan cenderung mengarah ke gaya kepemimpinan otoriter terutama aspek ruang partisipasi bawahan.

**b. Gaya kepemimpinan otoriter**

Gaya kepemimpinan otoriter adalah gaya kepemimpinan yang menggunakan metode pendekatan kekuasaan dalam mencapai keputusan dan pengembangan strukturnya, sehingga kekuasaanlah yang paling diuntungkan dalam organisasi. Gaya kepemimpinan ini mendeskripsikan pemimpin yang cenderung memusatkan kekuasaan kepada dirinya sendiri, mendikte bagaimana tugas harus diselesaikan,

membuat keputusan secara sepihak, dan meminimalisasi partisipasi bawahan.

Ciri-ciri gaya kepemimpinan otoriter adalah sebagai berikut:

- 1) Pemimpin kurang memperhatikan kebutuhan bawahan.
- 2) Komunikasi hanya satu arah yaitu kebawah saja.
- 3) Pemimpin cenderung menjadi pribadi dalam pujian dan kecamannya terhadap kerja setiap anggota.
- 4) Pemimpin mengambil jarak dari partisipasi kelompok aktif kecuali bila menunjukkan keahliannya

**c. Gaya Kepemimpinan *Laissez-faire* (kendali bebas)**

Gaya kepemimpinan kendali bebas mendeskripsikan pemimpin yang secara keseluruhan memberikan bawahannya atau kelompok kebebasan dalam pembuatan keputusan dan menyelesaikan pekerjaan menurut cara yang menurut bawahannya paling sesuai.

Ciri-ciri gaya kepemimpinan *Laissez-faire* adalah sebagai berikut:

- 1) Pemimpin membiarkan bawahannya untuk mengatur dirinya sendiri
- 2) Pemimpin hanya menentukan kebijaksanaan dan tujuan umum.
- 3) Bawahan dapat mengambil keputusan yang relevan untuk mencapai tujuan dalam segala hal yang mereka anggap cocok.

Seorang pemimpin suatu pemerintahan desa khususnya Kepala Pekon Kubuliku Jaya harus memiliki gaya kepemimpinan yang baik, sehingga

diharapkan seorang pemimpin tersebut akan dapat melaksanakan fungsi kepemimpinannya dalam organisasi yang dipimpinnya. Gaya kepemimpinan Kepala Pekon Kubuliku Jaya merupakan gaya kepemimpinan demokratis dimana dalam kepemimpinannya dikembangkan oleh Kepala Pekon Kubuliku Jaya dengan cara menggerakkan para bawahan atau orang-orang yang dipimpinnya untuk melaksanakan pekerjaan dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan organisasi melalui kerjasama antara pimpinan dan bawahan.

Pola kepemimpinan menurut Hersey dan Blanchard dalam Nursalam (2007), memiliki ciri-ciri yang meliputi : (1) Instruksi ditandai dengan : (a) Tinggi tugas dan rendah hubungan, (b) Komunikasi searah, (c) Pengambilan keputusan berada pada pemimpin dan peran bawahan sangat minimal, dan (d) Pemimpin banyak memberikan pengarahan atau instruksi yang spesifik serta mengawasi dengan ketat. (2) Konsultasi ditandai dengan : (a) Tinggi tugas dan tinggi hubungan, (b) Komunikasi dua arah, dan (c) Peran pemimpin dalam pemecahan masalah dan pengambilan keputusan cukup besar, bawahan diberi kesempatan untuk memberi masukan, dan menampung keluhan. (3) Partisipasi dengan ciri : (a) Tinggi hubungan tapi rendah tugas, (b) Pemimpin dan bawahan bersama-sama memberi gagasan dalam pengambilan keputusan. (4) Delegasi ditandai dengan : (a) Rendah hubungan dan rendah tugas dan (b) Komunikasi dua arah, terjadi diskusi antara pemimpin dan bawahan dalam pemecahan masalah serta bawahan diberi delegasi untuk mengambil keputusan.



Menurut Lippits dan White dalam Nursalam (2007) terdapat tiga gaya kepemimpinan yaitu: (1) Otoriter, (2) Demokratis. adalah kemampuan dalam memengaruhi orang lain agar bersedia bekerjasama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, berbagai kegiatan yang akan dilakukan ditentukan bersama antara pimpinan dan bawahan, dan (3) Liberal dan Laissez Faire adalah kemampuan memengaruhi orang lain agar bersedia bekerjasama untuk mencapai tujuan dengan cara berbagai kegiatan dan pelaksanaannya dilakukan lebih banyak diserahkan kepada bawahan. Dasar model gaya kepemimpinan situasional adalah : (a) Kadar bimbingan dan pengarahan yang diberikan oleh pemimpin (perilaku tugas), (b) Kadar dukungan sosio emosional yang disediakan oleh pemimpin (perilaku hubungan) dan (c) Tingkat kesiapan atau kematangan yang diperlihatkan oleh anggota dalam melaksanakan tugas dan fungsi mereka dalam mencapai tujuan tertentu (Nursalam, 2007).

### **3. Indikator Gaya Kepemimpinan**

Mengacu pada pendapat Hersey dan Blanchard (1995: 178), disusun definisi konseptual Gaya Kepemimpinan dipandang sebagai gaya kepemimpinan situasional yang terbentuk dari dinamika hubungan kerja di antara unsur-unsur pimpinan dan staf yang terungkap dari kadar bimbingan dan arahan yang diberikan pemimpin; Perilaku hubungan diantara pemimpin dan pengikut; dan level kesiapan pengikut dalam melaksanakan tugas, fungsi, atau tujuan tertentu.

Berdasarkan definisi konseptual tersebut diturunkan menjadi tiga dimensi kajian, yaitu dimensi Kadar bimbingan dan arahan yang diberikan pemimpin; dimensi perilaku hubungan diantara pemimpin dan pengikut; dan dimensi level kesiapan pengikut dalam melaksanakan tugas, fungsi, atau tujuan tertentu.

1. Dimensi kadar bimbingan dan arahan yang diberikan pemimpin dijabarkan menjadi indikator-indikator : (1) Bimbingan pimpinan terhadap staf dalam perencanaan kebijakan, (2) Bimbingan pimpinan terhadap staf dalam pelaksanaan kebijakan; (3) Bimbingan pimpinan terhadap staf dalam laporan hasil pelaksanaan kebijakan; (4) Arahan pimpinan terhadap staf dalam perencanaan pekerjaan; (5) Arahan pimpinan terhadap staf dalam pelaksanaan pekerjaan; dan (6) Arahan pimpinan terhadap staf dalam laporan hasil pelaksanaan pekerjaan;
2. Dimensi perilaku hubungan di antara pemimpin dan pengikut dijabarkan menjadi indikator-indikator : (7) Situasi hubungan formal antar pimpinan; (8) Situasi hubungan formal di antara pimpinan dengan staf; (9) Perlakuan pimpinan terhadap bawahan di dalam lingkungan kerja; (10) Situasi hubungan informal antar pimpinan; (11) Situasi hubungan informal di antara pimpinan dan staf; (12) Perlakuan pimpinan terhadap staf di luar lingkungan kerja; (13) Sikap pimpinan terhadap staf di dalam lingkungan kerja; dan (14) Sikap pimpinan terhadap staf di luar lingkungan kerja.
3. Dimensi level kesiapan pengikut dalam melaksanakan tugas, fungsi, atau tujuan tertentu dijabarkan menjadi indikator-indikator : (15)

Persepsi staf dalam menerima arahan pimpinan; (16) Kemampuan staf untuk melaksanakan tugas; (17) Kematangan staf dalam mengambil resiko pekerjaan; (18) kreativitas staf dalam melaksanakan pekerjaan; (19) Kemampuan staf membaca situasi sesuai gaya kepemimpinan; dan (20) Kemampuan komunikasi staf dengan pimpinan.

Berdasarkan tiga dimensi tersebut, dapat penelitian ini difokuskan pada lima indikator sebagai berikut yaitu:

a. Kebijakan

Merupakan tujuan dari kegiatan serta proses pelaksanaan program kegiatan

b. Pola kerja

Sistem kerja yang dilaksanakan berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP) pelaksanaan kebijakan

c. Pola komunikasi

Pola hubungan atau interaksi dari bawahan kepada atasan atau sebaliknya

d. Ruang partisipasi bawahan

Merupakan kondisi atau kesempatan untuk memberi masukan, dan menampung keluhan

e. *Positioning* pimpinan

Kemampuan seseorang dalam memengaruhi orang lain agar bersedia bekerjasama untuk mencapai tujuan dengan cara berbagai kegiatan dan pelaksanaannya

## **B. Konsep Pemerintahan Desa**

Desa merupakan suatu daerah yang memiliki sistem kemasyarakatan yang erat dan sebagian besar penduduknya bermata pencaharian dibidang agraris (Warpani, 2004: 45). Permukiman manusia yang letaknya diluar kota dan penduduknya agraris (Bintarto, 2007: 41).

Menurut Landis dalam Darsono (2005: 20) memberi batasan-batasan desa sebagai berikut:

- 1) Berdasarkan statistik, Pedesaan adalah daerah yang mempunyai penduduk lebih dari 2500 orang.
- 2) Berdasarkan psikologi sosial, Pedesaan adalah daerah dimana pergaulan ditandai dengan keakraban dan keramah-tamahan.
- 3) Berdasarkan ekonomi, Pedesaan adalah daerah yang pokok kehidupan masyarakatnya berasal dari pertanian

Menurut Penjelasan Umum Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang desa, menyebutkan bahwa salah satu landasan pemikiran pengaturan mengenai desa adalah otonomi asli, yang memiliki makna bahwa kewenangan Pemerintahan Desa dalam mengatur dan mengurus masyarakat setempat didasarkan pada hak asal usul dan nilai-nilai sosial budaya yang terdapat pada masyarakat setempat namun harus diselenggarakan dalam perspektif administrasi pemerintahan negara yang mengikuti perkembangan jaman.

Otonomi desa memiliki makna berbeda dengan otonomi daerah, otonomi daerah lebih diartikan sebagai pemberian wewenang oleh pemerintah untuk

mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersangkutan. Sedangkan makna otonomi desa lebih bersifat otonomi asli, yaitu pengaturan penyelenggaraan Pemerintahan Desa tetap dikembalikan pada desa sendiri, yaitu disesuaikan dengan adat istiadat serta kebiasaan masyarakat setempat. Otonomi desa merupakan hak, wewenang dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal usul dan nilai-nilai sosial budaya yang ada pada masyarakat setempat diberikan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang mengikuti perkembangan desa itu sendiri.

### **1. Pengertian Pemerintahan Desa**

Menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, desa dapat disebut dengan istilah atau nama yang lain. Dalam penelitian ini desa, selanjutnya ditulis dengan desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yurisdiksi, berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan atau dibentuk dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Kabupaten/Kota. Landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, mengakui otonomi yang dimiliki oleh desa melalui pemerintahan desa dapat diberikan penugasan ataupun pendelegasian dari pemerintah ataupun

pemerintah daerah untuk melaksanakan urusan pemerintah tertentu. Sedangkan desa di luar desa geneologis yaitu desa yang bersifat administratif seperti desa yang dibentuk karena pemekaran desa ataupun karena transmigrasi ataupun karena alasan lain yang warganya pluralistis, majemuk, ataupun heterogen, maka otonomi desa akan diberikan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan perkembangan desa itu sendiri.

Desa dapat melakukan perbuatan hukum, baik publik maupun perdata, memiliki kekayaan, harta benda, dan bangunan serta dapat dituntut dan menuntut di pengadilan. Kepala Desa dengan persetujuan BPD mempunyai wewenang untuk melakukan perbuatan hukum dan mengadakan perjanjian yang saling menguntungkan. Desa memiliki sumber pembiayaan berupa pendapatan desa, bantuan pemerintah dan pemerintah daerah, pendapatan lain-lain yang sah, sumbangan pihak ketiga dan pinjaman desa.

Penyelenggaraan pemerintahan desa dibentuk Badan Permusyawaratan Desa (BPD) atau sebutan lain yang sesuai dengan budaya yang berkembang di desa bersangkutan, yang berfungsi sebagai lembaga pengaturan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, seperti dalam pembuatan dan pelaksanaan Peraturan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, dan keputusan Kepala Desa. Di desa dibentuk lembaga kemasyarakatan yang berkedudukan sebagai mitra kerja pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat desa.

Kepala Desa pada dasarnya bertanggungjawab kepada rakyat desa yang dalam tata cara dan prosedur pertanggungjawabannya disampaikan kepada Bupati melalui Camat. Kepada Badan Permusyawaratan Desa, Kepala Desa wajib memberikan keterangan laporan pertanggung jawabannya dan kepada rakyat menyampaikan informasi pokok-pokok pertanggung jawabannya namun tetap harus memberi peluang kepada masyarakat melalui Badan Permusyawaratan Desa untuk menanyakan dan atau meminta keterangan lebih lanjut terhadap hal-hal yang berhubungan dengan pertanggungjawaban tersebut. Desa tidak lagi merupakan level administrasi, tidak lagi menjadi bawahan daerah tetapi menjadi *independent community*, sehingga setiap warga desa dan masyarakat desanya berhak berbicara atas kepentingannya sendiri dan bukan dari atas ke bawahan seperti selama ini terjadi. Desa dapat dibentuk, dihapus, dan/atau digabungkan dengan memperhatikan asal-usulnya atas prakarsa masyarakat dengan persetujuan pemerintahan kabupaten dan DPRD. Di desa dibentuk pemerintah desa yang terdiri atas Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dan perangkat desa. Perangkat Desa terdiri atas sekretaris desa dan perangkat desa lainnya seperti perangkat pembantu Kepala Desa terdiri dari sekretaris desa, pelaksana teknis lapangan seperti kepala urusan dan unsur kewilayahan seperti kepala dusun atau dengan sebutan lain.

Penyelenggaraan pemerintah desa merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintah sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Pemerintah Desa

dalam menjalankan tugas dan fungsinya menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi. Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya, kepala Desa bertanggung jawab kepada rakyat melalui BPD dan menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan tugasnya kepada Bupati tembusan Camat.

Kepala Desa dalam menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai penanggungjawab utama dalam bidang pembangunan dapat dibantu lembaga kemasyarakatan yang ada di desa. Sedangkan dalam menjalankan tugas dan fungsinya, sekretaris desa, kepala seksi, dan kepala dusun berada di bawah serta bertanggung jawab kepada Kepala Desa, sedang kepala urusan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada sekretaris desa.

Menurut Pasal 209 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, urusan pemerintah yang menjadi kewenangan desa adalah:

- a. Urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul desa.
- b. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten atau kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa.
- c. Tugas pembantuan dari pemerintah, pemerintah provinsi, dan atau pemerintah kabupaten atau kota.
- d. Urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada desa.



## 2. Pengertian Pemerintah Desa

Menurut Pasal 202 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Desa terdiri atas Kepala Desa dan Perangkat Desa. Kepala Desa adalah pemimpin pemerintah desa, sedangkan perangkat desa adalah unsur pemerintah desa yang terdiri dari unsur staf, unsur pelaksana teknis, dan unsur wilayah. Perangkat desa terdiri dari sekretaris desa dan perangkat desa lainnya.

Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya bertanggungjawab kepada rakyat melalui BPD dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati dengan tembusan Camat. Sedangkan perangkat Desa dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Desa. Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Desa dan perangkat Desa berkewajiban melaksanakan koordinasi atas segala pemerintahan desa, mengadakan pengawasan, dan mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas masing-masing secara berjenjang. Apabila terjadi kekosongan perangkat desa, maka Kepala Desa atas persetujuan BPD mengangkat pejabat perangkat desa.

Pemerintah Desa dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa. Kepala Desa sebagai pemimpin organisasi Pemerintah Desa dipilih langsung oleh dan dari penduduk desa warga negara Republik Indonesia yang syarat selanjutnya dan tata cara pemilihannya diatur dengan Peraturan Daerah yang berpedoman kepada peraturan Pemerintah. Sedangkan dalam

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa didefinisikan, Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

**a. Kepala Desa**

Kepala Desa menurut Ndraha dalam Djaenuri (2003: 4.11) adalah kepala organisasi Pemerintahan Desa yang berkedudukan strategis dan mempunyai tanggung jawab yang luas. Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 202 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah dipilih langsung oleh dan dari penduduk desa warga negara Republik Indonesia yang syarat selanjutnya dan tata cara pemilihannya diatur dengan Peraturan Daerah yang berpedoman pada Peraturan Pemerintah. Calon Kepala Desa yang memiliki suara terbanyak dalam Pemilihan Kepala Desa ditetapkan sebagai Kepala Desa. Kepala Desa terpilih dilantik oleh Bupati/Walikota paling lambat 30 hari setelah pemilihan, yang kemudian mengucapkan sumpah/janji sebelum memangku jabatannya.

Masa jabatan Kepala Desa adalah enam Tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan berikutnya. Namun masa jabatan ini dapat dikecualikan bagi kesatuan masyarakat hukum adat yang keberadaannya masih hidup dan diakui yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Kepala Desa pada dasarnya bertanggung jawab kepada rakyat desa yang dalam tata cara dan prosedur pertanggungjawabannya

disampaikan kepada bupati atau walikota melalui camat. Kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Kepala Desa wajib memberikan keterangan laporan pertanggungjawabannya dan kepada rakyat memberikan informasi pokok-pokok pertanggungjawabannya.

Kepala Desa dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa memiliki wewenang dan kewajiban. Wewenang Kepala Desa adalah:

- 1) Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD.
- 2) Mengajukan rancangan Peraturan Desa
- 3) Menetapkan Peraturan Desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD
- 4) Menyusun dan mengajukan rancangan Peraturan Desa mengenai APBDes untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD.
- 5) Membina kehidupan masyarakat desa
- 6) Membina perekonomian desa
- 7) Mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif.
- 8) Mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 9) Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kewajiban Kepala Desa adalah:

- 1) Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 2) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat
- 3) Memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat
- 4) Melaksanakan kehidupan demokrasi
- 5) Melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang bersih dan bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme.
- 6) Menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja Pemerintahan Desa.
- 7) Mentaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan.
- 8) Menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik
- 9) Melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan desa.
- 10) Melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan desa.
- 11) Mendamaikan perselisihan masyarakat desa.
- 12) Mengembangkan pendapatan masyarakat desa.
- 13) Membina, mengayomi dan melestarikan nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat.
- 14) Memberdayakan masyarakat dan kelembagaan di desa.
- 15) Mengembangkan potensi sumberdaya alam dan melestarikan lingkungan hidup.

**b. Perangkat Desa**

Perangkat Desa dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 202 Ayat (2) terdiri dari Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya. Perangkat Desa lain yang dimaksud dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 202 Ayat (2) adalah perangkat pembantu Kepala Desa yang terdiri dari Sekretariat Desa, Pelaksana Teknis Lapangan, seperti Kepala Urusan, dan Unsur Kewilayahan.

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, Pasal 12 Ayat (2), menyebutkan bahwa Perangkat Desa terdiri dari Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya, yang dimaksud Perangkat Desa lainnya pada Pasal 12 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005, terdiri atas Sekretaris Desa, Pelaksana Teknis Lapangan dan Unsur Kewilayahan. Perangkat Desa bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa menyebutkan bahwa Perangkat Desa terdiri dari:

**(1) Sekretaris Desa**

Sekretaris Desa dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Pasal 25 Ayat (1) diisi dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan, yaitu:

- 1) Berpendidikan paling rendah lulusan SMU atau sederajat;
- 2) Mempunyai pengetahuan tentang teknis pemerintahan;

- 3) Mempunyai kemampuan di bidang administrasi perkantoran;
- 4) Mempunyai pengalaman administrasi keuangan dan bidang perencanaan;
- 5) Memahami sosial budaya masyarakat setempat; dan
- 6) Bersedia tinggal di desa yang bersangkutan.

## **(2) Perangkat Desa Lainnya**

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Pasal 26 Ayat (1), menyebutkan Perangkat Desa lainnya diangkat oleh Kepala Desa dari penduduk desa. Ketentuan lebih lanjut mengenai Perangkat Desa lainnya diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Adapun Perangkat Desa lainnya menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 terdiri dari:

### 1) Sekretaris Desa

Sekretaris Desa mempunyai tugas membantu Kepala Desa di bidang pembinaan administrasi dan pemberian pelayanan teknis administrasi kepada seluruh perangkat Pemerintah Desa.

### 2) Pelaksana Teknis Lapangan

Pelaksana teknis lapangan dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 202 Ayat (2) itu seperti kepala urusan.

### 3) Unsur Kewilayahan

Unsur wilayah adalah unsur pembantu Kepala Desa di wilayah

bagian desa yang disebut kepala dusun atau dengan sebutan lain. Kepala dusun mempunyai tugas membantu melaksanakan tugas-tugas operasional Kepala Desa di dalam wilayah kerjanya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Untuk melaksanakan tugas tersebut kepala dusun mempunyai fungsi:

- a) Membantu pelaksanaan tugas Kepala Desa.
- b) Pelaksana kegiatan pemerintahan pembangunan dan kemasyarakatan serta ketenteraman dan ketertiban di masyarakat.
- c) Pelaksana keputusan desa di wilayah kerjanya
- d) Pelaksana kebijakan Kepala Desa
- e) Membina dan meningkatkan swadaya gotong-royong.
- f) Pelaksana kegiatan penyuluhan program pemerintah.
- g) Pelaksana tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Pemerintahan Desa merupakan lembaga perpanjangan pemerintah pusat memiliki peran yang strategis dalam pengaturan masyarakat desa/kelurahan dan keberhasilan pembangunan nasional. Karena perannya yang besar, maka perlu adanya Peraturan-peraturan atau Undang-Undang yang berkaitan dengan pemerintahan desa yang mengatur tentang pemerintahan desa, sehingga roda pemerintahan berjalan dengan optimal, hal ini sejalan dengan gaya kepemimpinan kepala desa yang memimpin wilayah tersebut.

### C. Kerangka Pikir

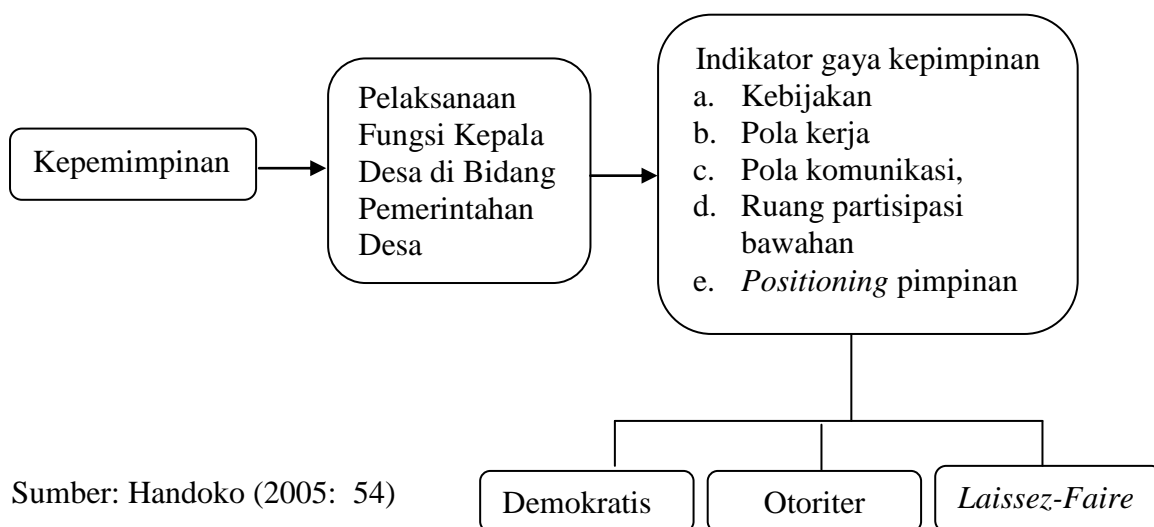
Berdasarkan pendapat dikemukakan oleh Handoko (2005: 54) bahwa macam-macam gaya kepemimpinan adalah sebagai berikut: Gaya kepemimpinan demokratis, kepemimpinan demokratis ditandai dengan adanya suatu struktur yang pengembangannya menggunakan pendekatan pengambilan keputusan yang kooperatif. Dibawah kepemimpinan demokratis bawahan cenderung bermoral tinggi, dapat bekerja sama, mengutamakan mutu kerja dan dapat mengarahkan diri sendiri gaya. Gaya kepemimpinan ini mendeskripsikan pemimpin yang cenderung mengikutsertakan bawahan dalam pengambilan keputusan, mendelegasikan kekuasaan, mendorong partisipasi bawahan dalam menentukan bagaimana metode kerja dan tujuan yang ingin dicapai, dan memandang umpan balik sebagai suatu kesempatan untuk melatih bawahan.

Gaya kepemimpinan otoriter adalah gaya kepemimpinan yang menggunakan metode pendekatan kekuasaan dalam mencapai keputusan dan pengembangan strukturnya, sehingga kekuasaanlah yang paling diuntungkan dalam organisasi. Gaya kepemimpinan ini mendeskripsikan pemimpin yang cenderung memusatkan kekuasaan kepada dirinya sendiri, mendikte bagaimana tugas harus diselesaikan, membuat keputusan secara sepihak, dan meminimalisasi partisipasi bawahan. Gaya kepemimpinan kendali bebas mendeskripsikan pemimpin yang secara keseluruhan memberikan bawahannya atau kelompok kebebasan dalam pembuatan keputusan dan menyelesaikan pekerjaan menurut cara yang menurut bawahannya paling sesuai.



Kepala Pekon Kubuliku Jaya memiliki gaya kepemimpinan yang baik, sehingga diharapkan seorang pemimpin tersebut akan dapat melaksanakan fungsi kepemimpinannya dalam organisasi yang dipimpinnya. Sifat-sifat pemimpin tidak seluruhnya dilahirkan, tetapi dapat juga dicapai lewat suatu pendidikan dan pengalaman. Dengan adanya gaya kepemimpinan sebagaimana disebutkan di atas maka diharapkan pemimpin akan dapat menjadi teladan dan contoh yang baik kepada para bawahan dalam bekerja sehingga produktivitas kerja mereka akan meningkat dan pada tahap selanjutnya akan dapat mencapai tujuan organisasi. Gaya kepemimpinan tersebut ditandai dengan ciri-ciri dari masing-masing gaya sebagai indikator untuk menentukan gaya kepemimpinan yang dipakai oleh Kepala Pekon Kubuliku Jaya yaitu: kebijakan, pola kerja, pola komunikasi, ruang partisipasi bawahan dan *positioning* pimpinan.

Kerangka pikir penelitian mengenai Gaya Kepemimpinan Kepala Pekon Kubuliku Jaya Kecamatan Batu Tulis Kabupaten Lampung Barat dalam Pelaksanaan Pemerintahan Desa adalah sebagai berikut:



Gambar 1. Kerangka Pikir Penelitian